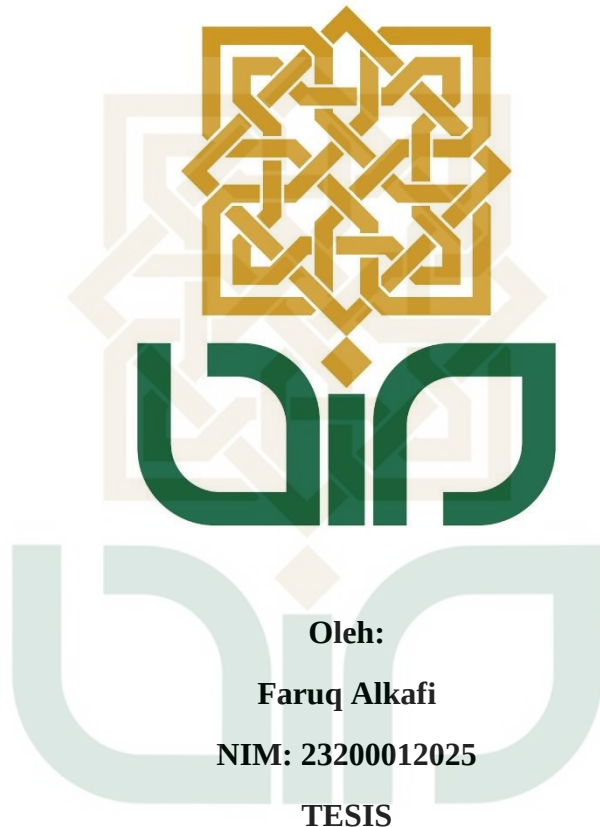


**SISTEM TEOKRASI DAN DEMOKRASI; KRITIK TEOLOGIS DAN
SOSIOLOGIS TERHADAP SISTEM *VELAYAT-E FAQIH* DAN DEMOKRASI
DI IRAN**



Oleh:

Faruq Alkafi

NIM: 23200012025

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Master of Arts
(M.A.)**

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Timur Tengah

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faruq Alkafi
NIM : 23200012025
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penellitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 Desember 2025
Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Faruq Alkafi
NIM. 23200012025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faruq Alkafi

NIM : 23200012025

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Desember 2025
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Faruq Alkafi
NIM. 23200012025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1461/Un.02/DPPs/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : Sistem Teokrasi dan Demokrasi: Kritik Teologis dan Sosiologis Terhadap Sistem Velayat-E Faqih dan Demokrasi di Iran

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARUQ ALKAFI, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 23200012025
Telah diujikan pada : Senin, 15 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6943cf2a16b18

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 6943f8eebf049

Penguji II

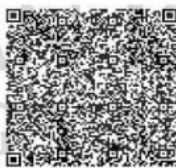
Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag. M.A.
SIGNED



Valid ID: 6944786772456

Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Valid ID: 6944a49399d28

Yogyakarta, 15 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian Tesis yang berjudul:

SISTEM TEOKRASI DAN DEMOKRASI; KRITIK TEOLOGIS DAN SOSIOLOGIS TERHADAP SISTEM *VELAYAT-E FAQIH* DAN DEMOKRASI DI IRAN

Yang ditulis oleh:

Nama : Faruq Alkafi
NIM : 23200012025
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art (M.A.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 November 2025
Pembimbing



Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag., M.A.
NIP. 19761203 200003 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari fenomena mengemukanya gelombang protes masyarakat Iran dalam beberapa tahun terakhir, yang mencapai puncaknya dalam Gerakan Woman, Life, Freedom pascawafatnya Mahsa Amini pada tahun 2022. Fenomena ini merepresentasikan dinamika teodemokrasi di Iran, sebuah sistem yang dibangun di atas transmisi klaim pengawasan ilahi dan mekanisme elektoral. Ketegangan yang berulang antara kedaulatan Tuhan yang diwujudkan melalui doktrin *velāyat-e faqīh* dan aspirasi partisipasi politik masyarakat memunculkan peluang pembelajaran mendasar mengenai penguatan legitimasi, keinginan, dan masa depan tatanan politik Iran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fondasi struktural dalam konstitusi dan praktik politik Iran yang menyatukan otoritas keulamaan dengan prinsip-prinsip demokrasi, serta mengkaji bagaimana dinamika tersebut memperkaya legitimasi politik yang semakin kokoh dalam gelombang protes kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah cara gerakan sosial mengartikulasikan aspirasi yang memperkuat sistem teokrasi. Penelitian ini menggunakan teori Post-Islamisme dari Asef Bayat dan teori Sekularitas Keagamaan dari Naser Ghobadzadeh sebagai kerangka analisis utama, dengan didukung oleh konsep *Guardian Regimes* yang dikembangkan oleh Payam Mohseni yang direinterpretasi sebagai mekanisme ketahanan rezim. Metode yang diterapkan adalah kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) yang diperkaya dengan analisis wacana terhadap konstitusi, doktrin *velāyat-e faqīh*, teks-teks akademis, serta dokumen-dokumen terkait gerakan sosial di Iran.

Temuan penelitian ini mengungkap beberapa hal berikut: Pertama, konstitusi Iran secara sistematis menginstitusionalisasikan sinergi antara kedaulatan ilahi dan kedaulatan rakyat, yang pada akhirnya menciptakan stabilitas politik yang adaptif dan berkelanjutan. Kedua, dalam praktiknya, doktrin *velāyat-e faqīh* mengalami proses birokratisasi dan politisasi yang memperkuat legitimasi spiritual para ulama serta mempercepat integrasi agama di ruang publik secara dinamis. Ketiga, Gerakan Woman, Life, Freedom menjadi bukti empiris atas kemampuan rezim dalam mengelola dan mengabsorpsi aspirasi masyarakat. Keempat, demokrasi substantif menawarkan penguatan transformasi politik Iran menuju sistem teokrasi yang lebih inklusif, melalui sinkronisasi wacana keagamaan dan pemberdayaan lembaga sosial masyarakat.

Kata kunci: Teodemokrasi Iran, *Velāyat-e faqīh*, Ketahanan Rezim, Integrasi Kedaulatan

ABSTRACT

This research stems from the phenomenon of the emergence of a wave of protests by the Iranian people in recent years, which reached its peak in the Woman, Life, Freedom Movement following the death of Mahsa Amini in 2022. This phenomenon represents the dynamics of theodemocracy in Iran, a system built on the transmission of divine oversight and electoral mechanisms. The recurring tension between the sovereignty of God, embodied in the doctrine of *velāyat-e faqīh*, and the aspirations for political participation among the people presents a fundamental learning opportunity regarding the strengthening of legitimacy, desires, and the future of Iran's political order.

The objective of this research is to analyze the structural foundations in Iran's constitution and political practices that unite clerical authority with democratic principles, as well as to examine how these dynamics enrich increasingly solid political legitimacy in the wave of contemporary protests. This study also aims to examine how social movements articulate aspirations that strengthen the theocratic system. This study uses Asef Bayat's Post-Islamism theory and Naser Ghobadzadeh's Religious Secularism theory as the main analytical framework, supported by Payam Mohseni's concept of Guardian Regimes, reinterpreted as a mechanism of regime resilience. The method applied is qualitative through a library research approach enriched with discourse analysis of the constitution, the doctrine of *velāyat-e faqīh*, academic texts, and documents related to social movements in Iran.

The findings of this study reveal the following: First, the Iranian constitution systematically institutionalizes the synergy between divine sovereignty and popular sovereignty, which ultimately creates adaptive and sustainable political stability. Second, in practice, the doctrine of *velāyat-e faqīh* has undergone a process of bureaucratization and politicization that strengthens the spiritual legitimacy of the clergy and accelerates the dynamic integration of religion into the public sphere. Third, the Woman, Life, Freedom Movement is empirical evidence of the regime's ability to manage and absorb the aspirations of the people. Fourth, substantive democracy offers a strengthening of Iran's political transformation towards a more inclusive theocracy, through the synchronization of religious discourse and the empowerment of social institutions.

Keywords: Iranian theocracy, *Velāyat-e faqīh*, regime resilience, sovereignty integration

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.”

(Q.S. Al-Mujadilah : 11)

وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah, kecuali kaum yang kafir.

(Q.S. Yusuf : 87)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan karya ini untuk diri sendiri dan untuk keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan yang tak ternilai harganya kepada penulis.

1. Kepada kedua orang tua tercinta, bapak Abdul Aziz dan ibu Marwiyah yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan berupa biaya dan tenaga yang tak terkira nilainya, semoga bapak dan ibu bangga atas penyelesaian penulisan tesis ini.
2. Kepada dua kakak perempuan tercinta, Qurrotul Aini dan Hulal Hayya dan adik perempuan tersayang, Dwi Suci Mega Sari yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Kepada kedua abang penulis, Ilham Arifi dan Haziq Hazmi yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Kepada Ketua Takmir dan jajaran pengurus Takmir Masjid Tunas Melati Yogyakarta yang senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan, serta tempat tinggal bagi penulis di Yogyakarta untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada seluruh teman-teman seangkatan Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Kajian Timur Tengah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Kepada seluruh teman-teman pemikir dan aktifis organik di seluruh Indonesia maupun dunia yang masih setia berpegang teguh dalam membela kebenaran dan keadilan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan kemudahan dalam proses penulisan tesis yang berjudul: ***Sistem Teokrasi Dan Demokrasi; Kritik Teologis Dan Sosiologis Terhadap Sistem Velayat-E Faqih Dan Demokrasi Di Iran***. Atas ridho dan pertolongan-Nya penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar. Salawat beserta salam pun selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Berkat ikhtiar penulis dengan segala proses bimbingan, pengarahan maupun bantuan dari berbagai pihak penyusunan tesis ini dapat selesai sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2024-2028 beserta para jajarannya.
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2024-2028 beserta para jajarannya.
3. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D. Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta periode 2024-2028 beserta para jajarannya.
4. Prof. Dr. H. Ibnu Burdah, S.Ag., M.A. Pembimbing Tesis yang sangat menginspirasi saya dan tanpa lelah selalu memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh Civitas akademika Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS RI), yang telah memberikan bantuan biaya pendidikan riset tugas akhir pada tahun 2025.
7. Kedua orang tua (Ayah Abdul Aziz dan Ibu Marwiyah) dan dua kakak perempuan saya (Qurrotul Aini dan Hulal Hayya) juga adik perempuan saya (Dwi Suci Mega Sari) serta kedua abang saya (Ilham Arifi dan Haziq Hazmi) yang telah memberikan dukungan, motivasi dan senantiasa mendo'akan penulis agar segera terselesaikannya penulisan tesis ini.
8. Pengurus takmir masjid Tunas Melati Yogyakarta yang senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan, dan tempat tinggal kepada penulis selama menempuh pendidikan di Yogyakarta.
9. Ahmad Jazuli selaku paman yang terus memberikan dukungan maupun bantuan moral dan spiritual kepada penulis.
10. Seluruh teman-teman dan keluarga besar alumni IAT 2019, khususnya Muchammad Faz Tazakka, S. Ag yang selalu menemani dan mendukung agar penulis semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Seluruh teman-teman seangkatan Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* 2024 dan sahabat karib saya, Bangkit Adi Saputra di kelas Konsentrasi Kajian Timur Tengah angkatan 2024.
12. Rekan marbot di masjid Tunas Melati, Khikam Alwinaja yang sama-sama berjuang di perantauan mengurus masjid.
13. Teman kuliner, ngopi dan jalan-jalan, Arifatush Sholihah dan Hanifatul Irbah yang terus memberikan dukungan dan semangat untuk mengerjakan tesis ini.
14. Seluruh teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	II
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	III
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	IV
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	V
ABSTRAK	VI
ABSTRACT	VII
MOTTO	VIII
HALAMAN PERSEMBAHAN	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	16
E. Kerangka Teoretis.....	23
1. Teori post-islamisme Asef Bayat.....	24
2. Teori religious secularity Naser Ghobadzadeh.....	26
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II	35
KRITIK TEOLOGIS TERHADAP TEOKRASI IRAN	35
A. Konstitusionalisme Iran dalam Perspektif Sejarah dan Teori Politik.....	36
1. Genealogi konstitusionalisme Iran dari Konsitusi 1906 menuju teokrasi konstitusional 1979	36

2. Posisi Iran dalam perdebatan teori politik global tentang teokrasi versus demokrasi.....	43
3. Konstitusi sebagai instrumen legitimasi dan mekanisme kontrol kekuasaan	50
B. Konstruksi Konstitusional Iran dan Dualisme Kekuasaan.....	56
1. <i>Velāyat-e faqīh</i> sebagai pilar konstitusional	57
2. Perkembangan praktik pasca-Revolusi 1979.....	60
C. Fenomena-fenomena di Iran kontemporer sebagai representasi kritik terhadap sistem politik Iran	64
1. Penolakan terhadap otoritas ulama.....	65
2. Tuntutan pemisahan negara-agama	67
D. Kritik Terhadap Legitimasi Konstitusional dan Alternatif Reformulasi.....	69
1. Dekonstruksi ulama-ulama dalam politik Iran	71
2. Konsep religious secularity sebagai alternatif	75
3. Keterbatasan kritis dan tantangan implementasi religious secularity dalam konteks iran kontemporer	79
BAB III.....	88
KRITIK SOSIOLOGIS TERHADAP SISTEM TEOKRASI	88
A. Dinamika Hubungan Konstitusional Teokrasi dan Mekanisme Partisipasi Sosial dalam <i>Velāyat-e Faqīh</i>	88
1. Post-Islamisme dan tantangan <i>velāyat-e faqīh</i>	89
2. Upaya mengontrol masyarakat	92
B. Artikulasi Konstitusional Identitas Kultural-Religius dan Dinamika Gerakan Sosial Kontemporer.....	97
1. Gerakan sosial sebagai mekanisme kontrol konstitusional terhadap penguasa	98
2. Retensi identitas islami-kultural masyarakat Iran	101
3. Bentuk-bentuk gerakan perlawanan masyarakat.....	104
C. Mobilisasi dan Artikulasi Kepentingan Kolektif dalam Gerakan Sosial Kontemporer.....	107
1. Peran generasi muda dan perempuan dalam memperkuat akuntabilitas konstitusional	109

2. Slogan dan simbol perlawanan dalam atikulasi gerakan sosial.....	112
D. Keterbatasan kritis teori post-islamisme Asef Bayat dalam menganalisis dinamika gerakan sosial iran kontemporer	116
BAB IV	126
VIABILITAS DAN PROSPEK SISTEM POLITIK IRAN REKONSTRUKSI MENUJU MODEL ALTERNATIF MASA DEPAN.....	126
A. Fondasi Konstitusional <i>Velāyat-e Faqīh</i> dan Revitalisasi Legitimasi Publik	127
1. Rekonstruksi epistemologi teokrasi konstitusional sebagai penguatan basis legitimasi religius-normatif	128
2. Integrasi partisipasi bottom-up sebagai penguatan legitimasi organik sistem teokrasi Iran	136
B. Sinkronisasi Nilai Revolusioner dan Aspirasi Kontemporer Secara Holistik	143
1. Revitalisasi prinsip-prinsip revolusi Iran 1979 dengan relevansi ideologis bagi generasi kontemporer.....	144
2. Penguatan mekanisme demokratis konstitusional untuk memperdalam kualitas partisipasi dan representasi.....	150
C. Sistem Politik Iran sebagai Model Alternatif dan Kontribusi Teoritis bagi Studi Politik Islam Global	158
1. Kontribusi epistemologis sistem politik Iran dalam melampaui dikotomi sekularisme-islamisme.....	159
2. Prospek masa depan viabilitas model Iran sebagai alternatif bagi negara-negara mayoritas Muslim	165
BAB V.....	170
Penutup	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran	172
DAFTAR PUSTAKA.....	174
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya berbagai gerakan protes masyarakat Iran dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan ketegangan yang terus meningkat terhadap sistem politik *hibrida*¹ antara teokrasi dan demokrasi yang diberlakukan sejak Revolusi 1979 sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi dan keberlanjutan sistem tersebut dalam konteks perubahan sosial dan tuntutan demokratisasi. Iran mengalami sejarah panjang dari pemerintahan dinasti selama 25 abad sampai berevolusi menjadi Republik Islam Iran pada tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Sistem perpolitikan Iran mengalami perubahan berdasarkan ijtihad politik yang dilakukan oleh Ayatollah Khomeini yaitu sistem *velāyat-e faqīh* dengan doktrin Imamah dalam Syiah imamiah.

Sistem politik Iran menampilkan karakteristik yang unik dalam tata pemerintahannya, yaitu dengan peran sentral Mullah dalam kepemimpinan negara, suatu model yang sejalan dengan konsep teodemokrasi yang digagas oleh Abu al-A'la al-Maududi (1903–1979). Konstruksi politik ini berbeda secara fundamental dari gagasan islamisasi kehidupan sosial dan politik seperti yang diuraikan oleh Sayyid Qutb (1906–1966) dalam karyanya *Ma'ālim fī aṭ-Ṭarīq*, maupun dari konsep islamisme

¹ Larry Jay Diamond, "Thinking About Hybrid Regimes," *Journal of Democracy* 13, no. 2 (2002): 21–35, <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0025>.

yang dikemukakan oleh Taqiuddin al-Nabhani (1909–1977). Terbentuknya Republik Islam Iran berlandaskan pada komitmen negara dan pemerintah untuk menegakkan syariat islam dengan mengupayakan sistem demokrasi yang tidak bertentangan dengan islam sehingga antara keduanya dapat dijalankan secara beriringan.²

Perubahan paradigma dalam pemerintahan Iran yang paling terlihat adalah bahwa pra revolusi negara Iran merupakan negara sekuler, yaitu pemisahan antara agama dan pemerintahan. Sedangkan pasca revolusi negara Iran menjadi negara teokrasi, dimana kepemimpinan banyak dipegang oleh *Mullah*. Konstitusi Iran mengatur tempat bagi seorang faqih untuk menjadi pemimpin yang diakui oleh rakyat yaitu orang yang berhak mengatur urusan-urusan karena alim tentang Allah sehingga dipercaya dalam urusan yang melibatkan kehalalan dan keharaman sesuai aturan syariat. Konsep sistem *velāyat-e faqīh* dalam hirarkinya bahwa kedaulatan tertinggi adalah Allah SWT, kemudian Imam Mahdi yang menjadi pemegang kekuasaan penuh tercatat dalam masa *Ghaybat-e Kubrā*. Sedangkan otoritas keagamaan (ulama/wali faqih) menjadi pemegang kekuasaan pada masa kegaiban Imam Mahdi.³

Struktur konsep pemerintahan Iran merupakan penggabungan dua konsep pemerintahan, yakni demokrasi barat dengan konsep Imamah syiah imamiah. Dua

² Wisnu Fachrudin Sumarno, “Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979,” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (24 Juli 2020): 146–147.

³ Neil Shevlin, “Velayat-E Faqih In The Constitution Of Iran: The Implementation Of Theocracy,” *Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (1998): 358–85, <https://www.docdroid.net/ELPN7Vg/neil-shevlin-velayat-e-faqih-in-the-constitution-of-iran-pdf#page=25>.

konsep ini dapat diidentifikasi dengan adanya konsep *trias politika* dalam pelaksanaan pemerintahan. Sedangkan konsep Imamah Syiah dapat dilihat berdasarkan kepemimpinan tertinggi dalam kekuasaan dipegang oleh pemimpin spiritual.⁴ Hasil penggabungan keduanya, konsep tersebut dapat terlaksana dalam ruang lingkup perpolitikan di Iran pasca revolusi 1979 dan menjadi konsep baru dalam paradigma hubungan demokrasi dan islam.

Demokrasi secara umum dapat didefinisikan bahwa kekuasaan berada pada kehendak rakyat. David Owen menganggap definisi tersebut adalah pandangan minimal sehingga masih ada harapan yang lebih besar dari sebuah demokrasi. David Owen memberikan tawaran konsep formal demokrasi, yaitu sebuah cara bagaimana semua anggota pemerintah setara dan mempunyai kapasitas untuk memerintah secara kolektif dalam hal untuk kepentingan bersama.⁵ Konsep formal ini dapat dilihat melalui dua ciri yang dianggap mendasar dalam sebuah demokrasi. Dua ciri tersebut adalah kesetaraan politik warga negara dan gagasan pemerintahan mandiri kolektif. Maka, terbentuknya lembaga-lembaga demokrasi mempunyai komitmen untuk memberikan jaminan kesetaraan politik warga negara dan memberikan fasilitas pemerintahan mandiri kolektif.

Pada abad ke-20 gagasan demokrasi banyak diselewengkan. Berbagai macam jenis demokrasi muncul setelah perang dunia II berakhir. Banyak orang mengklaim

⁴ Sumarno, "Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979," 145–58.

⁵ David Owen, *Political concepts* (Manchester University Press, t.t.), 106–7, <https://www.jstor.org/stable/j.ctt155jbcx.13>.

mendukung dan berupaya untuk melestarikan demokrasi. Akibatnya muncul berbagai macam demokrasi meliputi demokrasi sosial, demokrasi elit, demokrasi mayoritas, demokrasi massa, demokrasi terbatas dan demokrasi rakyat yang menunjukkan bahwa istilah-istilah ini tumpang tindih. Namun, pada dasarnya terdapat konsensus global bahwa demokrasi bertujuan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang berpihak pada kebaikan publik.⁶ Berdasarkan munculnya beberapa jenis istilah demokrasi, maka memberikan pemahaman bahwa demokrasi dalam praktiknya memiliki berbagai macam versi yang secara mendasar melibatkan rakyat dalam politik pemerintahan.

Ada tiga faktor yang menyebabkan demokrasi masih terhambat di negara-negara Islam. *Pertama*, peraturan dan regulasi yang berasal dari tuhan tidak dapat dilanggar, sehingga badan legislatif tidak punya kuasa mengubah aturan tersebut. *Kedua*, hukum syariah lebih mempertimbangkan kepentingan umum dan masyarakat daripada individu sehingga warga negara tidak mendapat perlakuan yang sama, sehingga hukum syariah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap individu sesuai dengan tanggung jawab mereka. *Ketiga*, menggabungkan hukum syariah kedalam hukum negara sehingga dapat menyebabkan pemerintahan otokratis.⁷ Berdasarkan ketiga faktor tersebut maka dapat dilihat kurang berkembangnya demokrasi di negara-negara Islam.

⁶ Conrad P. Waligorski, *The Political Theory of Conservative Economists* (Pers Universitas Kansas, 1990), 101.

⁷ Fatima Z. Rahman, "Determinants of Democracy in the Muslim World," *Polity* 45, no. 4 (Oktober 2013): 554–579.

Khususnya di negara Iran nilai-nilai ketuhanan sangat melekat dalam ideologi pemerintah sehingga mempengaruhi model sistem politik pemerintahan.

Polemik terjadi di beberapa negara Timur Tengah yang melakukan reformasi pemerintahan menjadi sistem demokrasi memunculkan banyak konflik di negaranya. Berbagai macam penolakan dari beberapa tokoh Islam konservatif seperti Sayyid Qutb (1906–1966) salah satu ideolog utama Ikhwanul Muslimin dan pemikir radikal, Abu al-A'la al-Maududi (1903–1979) pendiri *Jamaat-e-Islami* di Pakistan, Taqiuddin al-Nabhani (1909–1977) pendiri Hizbut Tahrir, menjadi hambatan berkembangnya demokrasi di negara-negara timur tengah. Mereka beranggapan bahwa demokrasi merupakan produk barat yang tidak sesuai dengan ajaran islam. Negara yang mempunyai tingkat religiusitas yang tinggi seperti Arab Saudi, maka dukungan terhadap demokrasi sangat sedikit, namun tidak keseluruhan.⁸

Negara Iran sebelum berevolusi menjadi Republik Islam Iran merupakan negara sekuler yang memisahkan agama dan politik pemerintahan.⁹ Namun, Ayatollah Khomeini berhasil merubah stigma negatif antara politik dan agama dalam ijtihad politiknya menjadikan Iran dengan sistem pemerintahan teodemokrasi berupa *velāyat-e faqīh*. Hal ini merupakan sebuah paradigma yang mempengaruhi perubahan berfikir masyarakat islam yang anti demokrasi.

⁸ Dana El Kurd, “Religiosity and Its Political Effects,” *AlMuntaqa* 1, no. 2 (2018): 84.

⁹ Syamsun Ni'am, “Dari Monarki Menuju Republik Islam: Menengok Iran Masa Lalu dan Masa Modern,” *Al- 'Adalah* 16, no. 1 (2022): 139–50, <https://aladalah.uinkhas.ac.id/aladalah/article/view/179>.

Konsep penggabungan antara Islam dan demokrasi sebenarnya telah terjadi perdebatan di kalangan ulama. Dalam hal ini pandangan ulama terhadap islam dan demokrasi dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok ulama, yakni *pertama*, kelompok yang menolak dan menganggap mustahil Islam dan demokrasi memiliki kesamaan. Diantara ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. *Kedua*, kelompok yang setuju bahwa dalam islam terdapat prinsip-prinsip demokrasi meski tetap ada perbedaan. Kelompok ini didukung oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran. *Ketiga*, kelompok yang mengakui dan menerima secara keseluruhan bahwa Islam sangat demokratis dan menyetujui struktur demokrasi yang ada. Diantara yang mendukung kelompok ini adalah Muhammad Husain Haikal dari Mesir, Rashid al-Ghannouchi, pemikir politik asal Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran.¹⁰

Penggabungan Islam dan demokrasi ini menjadi perdebatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Sistem politik pemerintah Iran mengklaim representasi ilahi, tetapi menurut Ghobadzadeh, agama dan politik harus dipisahkan secara fungsional. Ia mengusung konsep *religious secularity* dimana nilai-nilai agama bisa hidup dalam demokrasi tanpa dominasi institusi keagamaan atas negara. Ia menyatakan bahwa

¹⁰ Zulkarnen Zulkarnen, "Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (20 Desember 2017): 1-19.

teokrasi Iran merusak partisipasi politik dengan mengabsahkan otoritas ulama di atas suara rakyat.¹¹

Penggabungan teokrasi dan demokrasi menciptakan ketegangan yang tidak bisa disatukan. Kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu selalu dibatasi oleh institusi keagamaan yang tidak dipilih secara demokratis, seperti pemimpin tertinggi (*Rahbar-e Mo'azzam*) dan korps pengawal revolusi islam (*Sepāh-e Pāsdārān-e Enqelāb-e Eslāmī*), yaitu kekuatan militer independen yang loyal kepada *Rahbar*. Sistem ini hanya menciptakan ilusi demokrasi karena partisipasi politik masyarakat dikendalikan oleh segelintir elit ulama yang bersifat otoriter.

Meskipun Revolusi Islam 1979 menghadirkan transformasi radikal dalam struktur kekuasaan, sistem teokrasi hibrida yang dikembangkan Iran telah menunjukkan kemampuan adaptif dalam mengelola ketegangan sosial dan mempertahankan stabilitas institusional. Munculnya gelombang protes yang beragam—termasuk gerakan yang melibatkan perempuan, mahasiswa, dan kelompok sosial lainnya—justru dapat diinterpretasikan sebagai indikasi dari ruang politik yang cukup tersegmentasi dan mekanisme kontrol yang efektif dalam mencegah konsolidasi oposisi skala besar yang terorganisir secara nasional.¹² Fenomena ini mencerminkan bahwa sistem telah mengembangkan strategi differensiasi sosial yang mengizinkan ruang untuk

¹¹ Naser Ghobadzadeh, *Religious Secularity: A Theological Challenge to the Islamic State* (Oxford University Press, 2015), 95.

¹² Asef Bayat, *Social Movements and the Post-Islamist Turn* (Stanford University Press, 2007), 137, <https://doi.org/doi:10.1515/9781503626485>.

ketidakpuasan parsial sambil mempertahankan kerangka struktural fundamental, sehingga mencegah runtuhnya sistem secara keseluruhan.

Analisis terhadap post-Islamisme menunjukkan bahwa meskipun terjadi negosiasi ideologis antara identitas religius pribadi dan partisipasi politik formal, pemerintah Iran telah berhasil memperkuat mekanisme sosial yang memisahkan aspirasi kelompok-kelompok ini dari aksi kolektif yang dapat mengancam stabilitas rezim. Ketahanan sistem dalam menghadapi kritik terhadap *velāyat-e faqīh*—melalui saluran institusional, mekanisme represif yang terukur, dan penyesuaian retorika kebijakan—membuktikan bahwa model hibrida teokrasi-demokratis mampu mengabsorpsi tekanan internal tanpa mengalami transformasi fundamental. Dengan demikian, teodemokrasi Iran dapat dipandang sebagai proyek yang berhasil dalam menciptakan stabilitas jangka panjang di tengah heterogenitas sosial yang kompleks.

Gerakan "Woman, Life, Freedom" pada 2022–2023, meskipun merupakan ekspresi signifikan dari ketidakpuasan publik terhadap kebijakan tertentu, justru membuktikan kapasitas sistem dalam mengontrol dan membatasi dampak protes sebelum mencapai titik kritis transformatif., gerakan yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini ini, meskipun melibatkan partisipasi lintas etnis dan generasi,¹³ menjadi tantangan paling signifikan terhadap legitimasi pemerintahan teokrasi Iran sejak Revolusi 1979. tidak berhasil melampaui kritik terhadap isu-isu spesifik menuju konsolidasi oposisi sistemik

¹³ Amnesty International, "Iran: Death in Custody of Mahsa Amini Must Be Criminally Investigated," *Amnesty International* (London), 2022, <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5034/2022/en/>.

yang mampu menggoyahkan fondasi *velāyat-e faqīh* secara fundamental. Para demonstran, meskipun menggunakan retorika penolakan terhadap kekuasaan ulama dengan seruan seperti "Marg bar Dictator",¹⁴ terbukti tetap terikat dalam kerangka institusional yang mengizinkan ekspresi protestatif tetapi membatasi konversi aspirasi tersebut menjadi reorganisasi kekuasaan. Fakta bahwa gerakan ini sebagian besar didorong oleh perempuan muda dari wilayah perkotaan dengan dukungan lintas etnis,¹⁵ menunjukkan bahwa fragmentasi demografis protes itu sendiri menjadi mekanisme yang mencegah pembentukan basis oposisi terpadu. Generasi Z Iran yang menginginkan pemisahan agama dari urusan negara,¹⁶ tetap beroperasi dalam konteks institusional di mana saluran-saluran alternatif untuk aspirasi tersebut telah dibangun, mengurangi potensi destabilisasi radikal.

Evaluasi empiris terhadap gerakan "Woman, Life, Freedom" mengungkapkan bahwa sistem politik Iran berhasil mempertahankan legitimasi melalui diferensiasi antara legitimasi teologis pada tingkat makro dan toleransi terhadap praktik religius dan budaya privat pada tingkat mikro. Pendekatan teologis yang dikemukakan oleh Naser Ghoabadzadeh¹⁷ menunjukkan bahwa negara telah mengembangkan narasi keagamaan yang fleksibel, memungkinkan individu untuk memelihara identitas

¹⁴ BBC Persian Service, "Chanting 'Death to the Dictator': Iran's Protest Slogans Decoded," *BBC News*, 5 Oktober 2022, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63156324>.

¹⁵ Human Rights Activists News Agency (HRANA), *Demographic Analysis of Iran's 2022–2023 Protest Movement* (HRANA, 2023), 12–15.

¹⁶ Djavad Salehi-Isfahani, *Iran's Generation Z and the Crisis of Legitimacy*, 305 (Middle East Report, 2023), 14–17.

¹⁷ Ghoabadzadeh, *Religious Secularity*, 89–102.

religius personal sambil tetap berada dalam kerangka otoritas rezim.¹⁸ Pandangan sosiologis Asef Bayat¹⁹ mengkonfirmasi bahwa karakteristik gerakan—yang menolak formulasi negara terhadap Islam namun tetap memelihara identitas religius dan budaya secara pribadi—justru mencerminkan keberhasilan sistem dalam menciptakan ruang kognitif di mana oposisi ideologis tidak dialihkan menjadi mobilisasi politik yang mengancam. Dengan kata lain, ketegangan antara represi negara dan perlawanan masyarakat dalam aksi ini menunjukkan keseimbangan dinamis yang telah dicapai sistem untuk mempertahankan stabilitas di tengah pluralisme sosial.

Sistem politik hibrida Iran, yang menggabungkan teokrasi dengan mekanisme demokratis, telah berhasil menciptakan kontrol sosial melalui struktur yang memungkinkan partisipasi dan ekspresi ketidakpuasan dalam bentuk-bentuk yang terkontrol. Ketegangan antara kedaulatan Tuhan—melalui otoritas ulama—dan kedaulatan rakyat melalui pemilu tidak mengakibatkan kolaps, tetapi sebaliknya berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang yang mencegah konsentrasi kekuatan oposisi. Gelombang protes terbaru yang menuntut kebebasan sipil dan sekularisasi negara, meskipun menunjukkan aspirasi untuk transformasi, telah terbukti dapat dikelola melalui kombinasi represif selektif dan penyerapan tuntutan parsial yang tidak mengubah struktur fundamentalnya. Penelitian ini berupaya mendemonstrasikan bahwa resistensi masyarakat—khususnya dari generasi muda dan perempuan—

¹⁸ Naser Ghobadzadeh, “Theological Critique of Velayat-e Faqih,” *Democratization* 24, no. 3 (2022): 678–695, <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1994548>.

¹⁹ Bayat, *Social Movements and the Post-Islamist Turn*, 120–135.

terhadap formulasi spesifik dari *velāyat-e faqīh* justru menjadi bukti kapasitas sistem dalam mengabsorpsi kritik internal dan mempertahankan keseimbangan yang memungkinkan ketahanan jangka panjang, mencegah skenario transformasi radikal yang telah terjadi di negara-negara lain di kawasan Timur Tengah pasca-Arab Spring.

B. Rumusan Masalah

Peneliti memberikan batasan dalam penulisan karya ilmiah ini agar lebih terstruktur dan sistematis sehingga fokus dalam penelitian ini dapat maksimal dipusatkan pada permasalahan yang dikaji. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstitusi Iran menjadi politik yang mampu menjadi pijakan teokrasi dan demokrasi?
2. Bagaimana fenomena-fenomena gerakan-gerakan protes yang terjadi di Iran menjadi kritik yang membangun sistem teodemokrasi di Iran?
3. Apakah representasi sistem politik Iran menjadi sistem politik yang eksis dan alternatif dimasa depan?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kerangka konstitusional Iran sebagai fondasi institusional yang memungkinkan integrasi simultan antara prinsip-prinsip teokrasi berbasis *velāyat-e faqīh* dan mekanisme-

mekanisme demokratis, dengan fokus pada bagaimana desain konstitusional tersebut menciptakan struktur kekuasaan yang mengakomodasi kedaulatan Tuhan melalui otoritas ulama sekaligus mempertahankan partisipasi rakyat dalam proses pemilihan. Analisis ini akan mengidentifikasi konstruksi hukum dan institusional yang memungkinkan dua prinsip sovereignitas tersebut berjalan secara paralel tanpa mengalami kolaps sistemik.

Penelitian ini berusaha Mengevaluasi signifikansi dan viabilitas jangka panjang dari model teodemokrasi Iran sebagai representasi alternatif sistem politik yang dapat bertahan di tengah konteks pluralisme sosial, fragmentasi demografis, dan tekanan untuk demokratisasi, dengan mempertimbangkan apakah model hibrida ini menawarkan solusi politis yang replicable atau merepresentasikan konfigurasi unik yang bergantung pada kondisi-kondisi historis dan institusional spesifik Iran. Analisis ini akan mengkontekstualisasikan model Iran dalam lanskap perubahan politik Timur Tengah pasca-Arab Spring untuk menentukan potensi eksistensinya sebagai alternatif struktural bagi negara-negara dengan komposisi sosial dan keagamaan yang serupa.

Secara umum, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan kritik akademis terhadap sistem teokrasi di Iran, tetapi juga untuk membangun kerangka pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai dinamika politik kontemporer di negara tersebut. Dengan

mengombinasikan analisis terhadap teks konstitusi, kajian atas gerakan sosial, serta pembacaan kritis terhadap teori-teori politik Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang relevan bagi wacana akademik mengenai relasi antara agama dan negara, serta membuka ruang bagi refleksi atas prospek demokratisasi di dunia Muslim.

2. Signifikansi penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori-teori tentang hubungan antara agama dan demokrasi dalam konteks non-Barat. Secara konvensional, debat akademis mengenai demokrasi sering kali diposisikan dalam dikotomi antara sistem sekuler dan teokrasi, dengan asumsi bahwa keduanya bersifat inkompatibel. Penelitian ini menantang premis tersebut melalui analisis mendalam terhadap teodemokrasi Iran sebagai model hibrida yang menunjukkan bagaimana dua prinsip sovranitas—kedaulatan Tuhan melalui otoritas ulama dan kedaulatan rakyat melalui mekanisme pemilihan—dapat beroperasi secara simultan dalam satu struktur institusional. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya wacana akademis tentang pluralisme sistem politik dan membuka perspektif baru mengenai kemungkinan-kemungkinan integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kerangka demokratis yang tidak harus mengikuti model sekularisasi Barat. Temuan ini relevan bagi pengembangan teori ilmu politik perbandingan, teori hubungan agama-

negara, dan studi tentang inovasi institusional dalam menghadapi ketegangan sosial.

Pada tingkat praktis, penelitian ini menawarkan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemimpin di negara-negara dengan mayoritas populasi beragama Islam dan tingkat religiusitas tinggi yang sedang mengalami proses demokratisasi atau reformasi institusional. Model teodemokrasi Iran mendemonstrasikan bahwa legitimasi sistem politik dapat dipertahankan tidak hanya melalui representasi demokrasi murni, tetapi juga melalui diferensiasi antara legitimasi teologis pada tingkat makro dan toleransi terhadap pluralisme pada tingkat mikro. Pemahaman tentang mekanisme diferensiasi sosial yang dikembangkan Iran dalam mengontrol protes sambil mempertahankan stabilitas dapat memberikan pelajaran bagi negara-negara lain dalam mengelola ketegangan antara aspirasi demokratisasi dan pertahankan identitas keagamaan kolektif. Selain itu, analisis tentang bagaimana sistem ini menyerap dan mengintegrasikan kritik internal melalui mekanisme represif yang terukur dan penyesuaian retorika kebijakan dapat menjadi referensi dalam pengembangan strategi governance yang responsif terhadap pluralisme sosial tanpa mengorbankan stabilitas institusional.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada pemahaman tentang dinamika gerakan sosial dan protes di kawasan Timur Tengah dalam konteks pasca-Arab Spring. Dengan menganalisis gelombang protes terbaru

di Iran—terutama gerakan "Woman, Life, Freedom" (2022–2023)—sebagai studi kasus empiris, penelitian ini menunjukkan bagaimana aspirasi transformatif masyarakat dapat dikontrol dan dinetralisir melalui kombinasi represif selektif dan penyerapan tuntutan parsial. Analisis empiris ini menantang narasi konvensional yang sering mengasumsikan bahwa protes skala besar secara otomatis mengarah pada transformasi sistemik atau kejatuhan rezim. Sebaliknya, penelitian ini mengungkapkan mekanisme-mekanisme rumit yang memungkinkan sistem untuk tetap bertahan meskipun menghadapi mobilisasi lintas etnis dan generasi yang signifikan. Temuan ini berkontribusi pada pengayaan teori tentang resistensi, adaptasi rezim, dan batas-batas transformasi sosial dalam sistem-sistem autokratis hibrida, yang sangat relevan bagi studi komparatif tentang ketahanan rezim di negara-negara berkembang.

Pada level kontekstual, penelitian ini memiliki signifikansi khusus dalam memahami lanskap politik Timur Tengah kontemporer dan kemungkinan skenario masa depan dalam region tersebut. Dengan mengevaluasi viabilitas dan alternatif yang ditawarkan oleh model teodemokrasi Iran, penelitian ini memberikan kontribusi pada analisis strategis tentang stabilitas dan transformasi di kawasan yang terus mengalami ketegangan geopolitik dan sosial. Pertanyaan tentang apakah teodemokrasi Iran dapat menjadi model alternatif yang eksis dan berkembang di masa depan tidak hanya relevan bagi Iran sendiri, tetapi juga

bagi negara-negara tetangga dan komunitas internasional yang mencoba memahami dinamika perubahan sosial-politik di Timur Tengah. Selain itu, penelitian ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor struktural dan institusional yang membuat model Iran dapat bertahan, sehingga dapat menjadi referensi dalam memprediksi skenario stabilitas atau destabilisasi di negara-negara lain dengan konteks historis dan keagamaan yang serupa. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman holistik tentang masa depan sistem politik di kawasan dan potensi pembelajaran timbal-balik dalam wacana pembaharuan institusional antar negara-negara muslim.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, teridentifikasi sejumlah literatur yang relevan dengan fokus kajian penulis mengenai mekanisme legitimasi dan ketahanan sistem *velayat-e faqih* dalam struktur politik Iran. Aspek penguatan kedaulatan religius melalui institusionalisasi kompleks dan keseimbangan veto players telah menjadi objek penelitian dalam sejumlah karya akademis, di antaranya ditulis oleh para akademisi seperti H. E. Chehabi, Ali Mirsepassi, Payam Mohseni, Iain Macgillivray, Amir Mohammad Khorshidi Nazloo, Seyed Amir Niakooee, dan Abdessamad Belhaj.

Kajian sistematis terhadap konfigurasi politik Iran mengungkap desain yang canggih dalam mempertahankan supremasi *velayat-e faqih* melalui mekanisme checks-and-balances yang kompleks. Chehabi mengidentifikasi struktur "dual citizenship"

dalam praktik politik Iran sebagai mekanisme yang efektif dalam memperkuat komitmen ideologis rezim. Melalui diferensiasi antara warga kosmopolitan dan komunitas ommat-e hezbollah (komunitas partai Tuhan), sistem ini memastikan bahwa nilai-nilai teokratik tetap menjadi orientasi utama pengambilan keputusan politik. Secara signifikan, Chehabi menyimpulkan bahwa rezim Iran telah membuktikan ketahanannya bukan sekadar melalui pencegahan perubahan institusional, melainkan justru melalui kemampuannya untuk beradaptasi dan mentransformasi diri secara gradual sambil tetap mempertahankan parameter dasar *velayat-e faqih* melalui proses negosiasi dan kompromi antar-faksi yang difasilitasi oleh multiple veto players ideologis. Kekuatan fundamental sistem ini terletak pada supremasi *velayat-e faqih* yang dapat memberikan arahan strategis ketika terjadi ketidakseimbangan institusional. Desain ini menciptakan stabilitas jangka panjang rezim melalui mekanisme yang Chehabi sebut sebagai "managed instability"—sebuah kondisi di mana multiple centers of power berkompetisi dalam kerangka institusional yang ketat namun tetap menerima dan memperkuat parameter dasar sistem teokratik. Dengan demikian, sistem *velayat-e faqih* membuktikan dirinya sebagai suatu bentuk pemerintahan yang kokoh dan dapat beradaptasi terhadap berbagai tantangan internal maupun eksternal.²⁰

Dilema yang dipelajari Chehabi tersebut sebenarnya menunjukkan kekuatan sistem *velayat-e faqih* dalam merekonsiliasi berbagai sumber legitimasi, sebagaimana

²⁰ H. E. Chehabi, "The Political Regime of the Islamic Republic of Iran in Comparative Perspective," *Government and Opposition* 36, no. 1 (2001): 48–70, <https://doi.org/10.1111/1477-7053.00053>.

dijelaskan lebih lanjut oleh Mirsepassi. Mirsepassi mengidentifikasi bahwa sistem Iran telah berhasil mengatasi ketegangan potensial antara kedaulatan Ilahi dan partisipasi rakyat melalui konstruksi teologis dan institusional yang inovatif. Revolusi Islam 1979 tidak hanya menciptakan rezim baru, tetapi juga melahirkan wacana kaya yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan mekanisme partisipatif, menciptakan model unik demokrasi Islami yang berbeda dari paradigma Barat. Gerakan reformasi di bawah Khatami (1997-2005) menunjukkan fleksibilitas sistem dalam mengakomodasi aspirasi demokratis tanpa mengorbankan prinsip-prinsip teokratik fundamental. Reinterpretasi konsep civil society dan pluralisme religius dalam kerangka Islam mendemonstrasikan bahwa *velayat-e faqih* bukan sistem yang rigid, melainkan mampu menyerap kritik konstruktif dan mengintegrasikan inovasi institusional. Secara kritis, Mirsepassi menyimpulkan bahwa kekuatan sistem Iran terletak pada kemampuannya untuk melampaui binary antara sekularisme dan teokrasi absolut, mengembangkan sintesis baru yang mengakui pluralitas interpretasi Islam sambil tetap mempertahankan komitmen pada prinsip-prinsip teokratik yang kokoh dan berdasarkan pada ketauhidan.²¹

Analisis mengenai ketahanan rezim ini diperkuat oleh Mohseni, yang menganalisis keunggulan komparatif rezim Iran melalui kerangka kerja "guardian regimes"—rezim yang menggabungkan mekanisme pemilihan kompetitif dengan

²¹ Ali Mirsepassi, *Democracy in Modern Iran: Islam, Culture, and Political Change* (NYU Press, 2010), n.

lembaga tutelar ideologis yang kuat dalam harmoni yang fungsional. Temuan utamanya menunjukkan bahwa Iran telah mempertahankan stabilitas dan kontinuitas sebagai rezim hibrida selama lebih dari tiga dekade, melampaui rata-rata durasi rezim hibrida lainnya, karena kehadiran pemain veto ideologis yang saling menyeimbangkan dalam kerangka *velayat-e faqih*. Iran membuktikan bahwa dengan sistem checks-and-balances yang dirancang dengan cermat, negara dapat mempertahankan kompetisi elektoral sambil menjaga integritas ideologis dan mencegah penyimpangan dari prinsip-prinsip teokratik, meskipun memiliki pemimpin super-veto dan sumber daya melimpah yang dapat memicu ketidakstabilan. Dengan demikian, Mohseni berkontribusi pada pemahaman tentang pemerintahan hibrida dengan menunjukkan bahwa institusionalisasi berkelanjutan dicapai melalui mekanisme inklusi yang terstruktur, yang mengarahkan transformasi institusional secara bertahap dan terkontrol dalam batas-batas yang ditetapkan oleh *velayat-e faqih*. Desain ini memungkinkan diversitas perspektif sambil memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai inti sistem.²²

Mekanisme kontrol dan inklusi yang dirancang dalam sistem teokratik Iran terbukti efektif dalam merespons tantangan mobilisasi sosial. MacGillivray dalam tulisannya menganalisis Gerakan Hijau 2009 bukan sebagai kegagalan sistem, melainkan sebagai demonstrasi efektivitas mekanisme kontrol dan adaptasi rezim. Kegagalan gerakan tersebut menunjukkan bahwa sistem Iran mampu mengintegrasikan

²² Payam Mohseni, *Guardian Politics In Iran: A Comparative Inquiry Into The Dynamics Of Regime Survival* (Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown, 2012).

berbagai lapisan sosial melalui jaringan patronase yang kompleks dan respons yang proporsional, sementara aparat keamanan menjalankan fungsi stabilitas yang diperlukan untuk mempertahankan kontinuitas institusional. MacGillivray menyimpulkan bahwa ketangguhan rezim Iran berasal dari kombinasi strategis antara kontrol struktural IRGC yang terkoordinasi, dialog berkelanjutan dengan berbagai segmen masyarakat, dan adaptasi elite dalam proses elektoral yang responsif terhadap preferensi publik dalam batas-batas ideologis yang telah ditetapkan. Gerakan Hijau menandai momen di mana sistem teokratik Iran menunjukkan kematangannya dalam mengelola tantangan internal tanpa mengorbankan stabilitas fundamental atau prinsip-prinsip *velayat-e faqih*.²³

Respons rezim terhadap tantangan sosial-politik telah menghasilkan modernisasi institusional yang signifikan. Nazloo dan Niakooee menemukan bahwa Gerakan Hijau 2009 dan mobilisasi pasca-2017 telah memicu peningkatan kapasitas institusional negara, yang dibuktikan dengan penguatan profesionalisasi dan efektivitas operasional Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Ekspansi pengaruh IRGC dalam dimensi politis, ekonomis, dan keamanan mencerminkan evolusi institusional yang dirancang untuk merespons kompleksitas tantangan kontemporer sambil mempertahankan kemampuan pertahanan ideologi dan integritas nasional.

²³ Iain Macgillivray, "The Resilience of Authoritarianism in Iran After the 2009 Election," *International Relations*, 2016, <https://www.e-ir.info/2016/05/04/the-resilience-of-authoritarianism-in-iran-after-the-2009-election/>.

Dengan kata lain, transformasi yang dialami sistem Iran menunjukkan bahwa *velayat-e faqih* memiliki kapasitas untuk melakukan modernisasi institusional dan upgrade kapabilitas keamanan strategis sebagai respons rasional terhadap dinamika geopolitik dan tantangan keamanan nasional yang berkembang. Proses ini menunjukkan bahwa sistem teokratik bukan entitas statis, melainkan organisme institusional yang dinamis dan adaptif.²⁴

Kontekstualisasi perkembangan institusional Iran dapat dipahami dalam kerangka evolusi pemikiran politik Islam secara global, seperti yang disajikan oleh Abdessamad Belhaj. Ia menyajikan narasi perkembangan pemikiran politik Islam kontemporer yang menunjukkan pergeseran signifikan dari konsep abstrak kedaulatan ilahi (*ḥākimiyya*) menuju realisasi konkret kedaulatan rakyat dalam kerangka teologis. Revolusi Islam Iran, di bawah bimbingan *velayat-e faqih*, telah membuktikan bahwa gagasan kedaulatan ilahi bukan sekadar konsep ideal, melainkan dapat diinstitusionalisasi dalam bentuk pemerintahan yang merespons aspirasi rakyat. Sejak 1990-an, sistem Iran menunjukkan kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai partisipasi publik, konsultasi (*shūrā*), dan legitimasi yang bersumber dari kehendak rakyat sambil tetap mempertahankan supremasi kedaulatan ilahi sebagai fondasi filosofis. Pencapaian ini menunjukkan bahwa *velayat-e faqih* telah berhasil melampaui kritik bahwa kedaulatan ilahi dan demokrasi partisipatif adalah konsep yang

²⁴ Amir Mohammad Khorshidi Nazloo dan Seyed Amir Niakooee, "Trajectory of Democracy in Iran from 2009 to 2022: An Analysis Based on Charles Tilly's Framework of Democratization and De-Democratization," *Democracy and Security*, Routledge, 2025. <https://doi.org/10.1080/17419166.2025.2449654>.

bertentangan. Sebaliknya, sistem Iran membuktikan bahwa kedua prinsip tersebut dapat bersintesis menjadi model tata kelola yang koheren, sebagaimana dicontohkan oleh pengalaman empiris selama lebih dari empat dekade.²⁵

Meskipun berbagai studi telah memetakan struktur kekuasaan, mekanisme adaptasi institusional, dan efektivitas rezim, analisis mendalam mengenai mekanisme spesifik yang memungkinkan sistem velayat-e faqih untuk terus berkembang dan merespons tantangan kontemporer masih perlu diperdalam. Penelitian terdahulu cenderung terfokus pada analisis komparatif atau narrative ketahanan, tanpa mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana logika internal velayat-e faqih—sebagai prinsip yang mengintegrasikan kedaulatan ilahi, kepemimpinan ulama, dan partisipasi rakyat—mampu menciptakan stabilitas jangka panjang dan legitimasi berkelanjutan.

Celah penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis secara empiris dan konseptual bagaimana kekuatan-kekuatan konstitutif sistem—seperti rule of law Islami yang berpusat pada prinsip keadilan religius, ekonomi yang terintegrasi dengan nilai-nilai distributif Islam, dan keamanan yang mengutamakan ketahanan ideologis nasional—telah menggerakkan persepsi di kalangan berbagai segmen masyarakat Iran terhadap relevansi dan legitimasi praktis dari fondasi teokratik rezim. Penelitian semacam itu diperlukan untuk memahami prospek pendalaman dan pengembangan

²⁵ Abdessamad Belhaj, “From Divine to Popular Sovereignty: The Civil Shift in Contemporary Islamic Political Thought,” *Religions* 16, no. 5 (2025): 622, <https://doi.org/10.3390/rel16050622>.

sistem velayat-e faqih di tengah dinamika global kontemporer dan tantangan keamanan regional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kerangka holistik yang menunjukkan bahwa penguatan dan pengembangan sistem velayat-e faqih tidak memerlukan adopsi model eksternal, melainkan dapat dicapai melalui dua dimensi komplementer: pertama, melalui reinterpretasi berkelanjutan dan pendalaman wacana keagamaan yang mengaktualisasikan konsep velayat-e faqih dan demokrasi Islam dalam konteks tantangan kontemporer; kedua, melalui pemberdayaan institusi-institusi sosial dan ekonomi di tingkat akar rumput yang mengamalgamasi aspirasi keagamaan, nasionalisme, dan kesejahteraan ekonomi bersama. Pendekatan ini melampaui dikotomi antara teokrasi absolut dan sekularisasi, menunjukkan bahwa velayat-e faqih adalah model pemerintahan yang dinamis, inklusif, dan relevan bagi masyarakat Iran kontemporer.

E. Kerangka Teoretis

Sebuah penelitian memerlukan kerangka teoritis yang kokoh agar fokus dan arahnya terpandu dengan jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan dua kategori teori, yaitu teori utama dan teori pendukung. Sebagai teori utama, penelitian ini menggunakan *teori Post-Islamisme* yang dikembangkan oleh Asef Bayat dan *teori Religious Secularity* yang digagas oleh Naser Ghobadzadeh. Sementara itu, untuk memperkaya analisis, penelitian ini menggunakan konsep Ketahanan Rezim (*Regime Resilience*) dari Payam Mohseni sebagai teori pendukung.

Kerangka teoretis ini dirancang untuk memahami mekanisme yang memungkinkan sistem politik Iran tetap bertahan dan beradaptasi di tengah tantangan sosial-politik yang kompleks.

1. Teori post-islamisme Asef Bayat

Post-islamisme, sebagai kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Asef Bayat, memberikan perspektif komprehensif dalam memahami transformasi sosial dan keagamaan di masyarakat Muslim setelah terjadinya revolusi Islam. Gagasan ini pertama kali diperkenalkan melalui karya Bayat berjudul *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Dalam karyanya tersebut, Bayat mendefinisikan post-Islamisme sebagai "sebuah kondisi di mana masyarakat berupaya melampaui Islam politik yang bersifat otoriter, sembari tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual Islam secara personal".²⁶ Teori ini lahir sebagai tanggapan atas transformasi masyarakat Muslim yang mengalami kelelahan ideologis terhadap proyek negara Islam, sekaligus menawarkan jalan tengah antara sekularisme yang ekstrem dan Islamisme politik yang rigid. Kerangka post-Islamisme memberikan wawasan penting tentang bagaimana sistem politik, meskipun menghadapi gelombang protes sosial yang berkelanjutan, tetap mampu mempertahankan basis legitimasi melalui mekanisme diferensiasi sosial yang modern.

²⁶ Bayat, *Social Movements and the Post-Islamist Turn*, 10–11.

Dalam konteks Iran pasca-Revolusi 1979, teori post-Islamisme menjelaskan mengapa masyarakat—khususnya generasi muda—yang secara ideologis mengalami transformasi pasca-Islamis, tidak sepenuhnya meninggalkan identitas keagamaan mereka. Sebaliknya, mereka mengembangkan bentuk spiritualitas personal yang terpisah dari politisasi agama oleh negara. Fenomena ini mengindikasikan bahwa sistem *velāyat-e faqīh*, meskipun menghadapi alienasi ideologis, mampu mengakomodasi pluralitas identitas ini melalui pemisahan antara ranah publik-politik dan ranah privat-religius.²⁷

Keunggulan teori post-Islamisme terletak pada kemampuannya dalam menjelaskan dinamika perubahan sosial yang berkembang secara organik dari tingkat akar rumput (*bottom-up*). Bayat menyoroti peran aktor-aktor non-negara sebagai penggerak transformasi sosial, tanpa mengandalkan struktur kepemimpinan hierarkis yang terpusat.²⁸ Gerakan *Woman, Life, Freedom*, meskipun merupakan perlawanan terhadap kebijakan spesifik negara, sekaligus menunjukkan bagaimana masyarakat tetap mengintegrasikan simbol-simbol religius ke dalam narasi perjuangannya. Integrasi ini justru mengungkapkan kapasitas sistem dalam

²⁷ *Ibid*, 45.

²⁸ Asef Bayat, *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East* (Stanford University Press, 2010), 72.

mengakomodasi keberagaman aspirasi sosial tanpa mengalami kolaps struktural.

Dalam penelitian ini, kerangka post-Islamisme digunakan untuk menganalisis tiga aspek utama: (1) bagaimana sistem *velāyat-e faqīh* mampu beradaptasi dengan transformasi aspirasi masyarakat yang dinamis, (2) cara masyarakat mengembangkan bentuk resistensi kreatif yang tidak mengancam stabilitas fundamental rezim, dan (3) mekanisme melalui yang mana negara menciptakan ruang kognitif bagi koeksistensi identitas keagamaan dengan penolakan politisasi agama.

2. Teori religious secularity Naser Ghobadzadeh

Konsep *religious secularity* yang dikembangkan oleh Naser Ghobadzadeh menghadirkan paradigma analitis yang unik dalam memahami hubungan antara agama dan negara di dunia Muslim kontemporer, khususnya dalam konteks sistem politik Iran. Dalam karya utamanya, *Religious Secularity: A Theological Challenge to the Islamic State* (2015), Ghobadzadeh mendefinisikan konsep ini sebagai "kerangka teologis yang memisahkan otoritas keagamaan dari kekuasaan politik secara institusional, tanpa mengabaikan peran normatif agama dalam ranah publik".²⁹ Berbeda dengan sekularisme ala Barat yang sering dipahami sebagai upaya menyingkirkan agama dari ruang publik, *religious secularity*

²⁹ Ghobadzadeh, *Religious Secularity*, 5.

justru berusaha mempertahankan nilai-nilai spiritual sebagai sumber inspirasi moral bagi masyarakat sambil menolak institusionalisasi agama dalam struktur kekuasaan negara. Pendekatan Ghobadzadeh ini memungkinkan analisis tentang bagaimana sistem *velāyat-e faqīh*, meskipun secara ideologis mengklaim representasi ilahi, sebenarnya beroperasi dengan logika politik yang sekuler dan pragmatis.

Analisis Ghobadzadeh terhadap sistem politik Iran memberikan kontribusi signifikan dalam mengidentifikasi paradoks struktural yang inheren dalam model teodemokrasi. Ia mengungkap bahwa integrasi institusional antara otoritas keagamaan dan kekuasaan negara menciptakan ketegangan yang seolah-olah "diselesaikan" melalui mekanisme kompleks berupa multiple veto players, pemisahan fungsi yang terstruktur, dan narasi ideologis yang fleksibel. Sistem ini mampu mempertahankan kedua klaim—legitimasi teologis dan partisipasi demokratis—secara simultan, meskipun dalam praktiknya terjadi subordinasi sistematis kedaulatan rakyat terhadap otoritas keagamaan.³⁰

Keunggulan teori *religious secularity* dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menganalisis bagaimana negara mampu mempertahankan legitimasi ganda: legitimasi teologis pada level makro yang diartikulasikan melalui doktrin *velāyat-e faqīh*, dan toleransi terhadap

³⁰ *Ibid*, 92–93.

pluralisme privat pada level mikro yang memungkinkan individu menjalankan agama sesuai interpretasi personal mereka. Pemisahan ini menciptakan ekosistem sosial yang memungkinkan koeksistensi antara otoritarianisme struktural dan kebebasan personal terbatas, sehingga mengurangi tekanan untuk transformasi sistemik yang menyeluruh.³¹

Dalam penelitian ini, teori *religious secularity* digunakan untuk menganalisis tiga aspek utama: (1) mekanisme diskursif melalui mana negara mempertahankan legitimasi ganda dengan memisahkan ranah publik-teopolitik dari ranah privat-spiritual, (2) bagaimana pemisahan ini memungkinkan akomodasi terhadap pluralitas identitas tanpa mengancam fondasi teokratis rezim, dan (3) cara masyarakat merespons model ini dengan mengembangkan bentuk sekularisasi internal yang tetap mempertahankan identitas religius.

Untuk memperkaya analisis tentang bagaimana sistem politik Iran mampu bertahan dalam jangka panjang, penelitian ini mengintegrasikan konsep *Guardian Regimes* (Rezim Pengawal) yang dikembangkan oleh Payam Mohseni. Konsep ini menawarkan kerangka komparatif untuk memahami mengapa sistem hibrida Iran mampu mempertahankan stabilitas lebih lama dibandingkan dengan rezim hibrida lainnya di kawasan Timur Tengah.

³¹ *Ibid*, 117.

Mohseni mengidentifikasi mekanisme ketahanan sistem Iran melalui kombinasi unik antara: (1) kehadiran multiple veto players ideologis yang saling menyeimbangkan dalam kerangka *velāyat-e faqīh*, (2) desain institusional yang memungkinkan kompetisi elektoral terkontrol sambil mempertahankan supremasi teokratis, dan (3) infrastruktur keamanan yang terintegrasi (terutama Korps Pengawal Revolusi Islam) yang beroperasi dengan loyalitas langsung kepada Rahbar di luar jalur pertanggungjawaban formal.

Ketahanan rezim Iran terletak pada kapasitasnya untuk mengelola ketegangan struktural melalui apa yang Mohseni sebut sebagai "managed instability" — sebuah kondisi di mana multiple centers of power berkompetisi dalam kerangka institusional yang ketat namun tetap menerima dan memperkuat parameter dasar sistem teokratik. Model ini memungkinkan sistem untuk menyerap tekanan internal tanpa mengalami perubahan fundamental pada struktur kekuasaannya.³²

Dalam penelitian ini, konsep ketahanan rezim digunakan untuk menganalisis: (1) mekanisme institusional yang memungkinkan sistem *velāyat-e faqīh* beradaptasi dengan tekanan sosial-politik berkelanjutan, (2) bagaimana diferensiasi sosial yang terstruktur mencegah konsolidasi oposisi skala besar yang terorganisir nasional, dan (3) cara sistem mengintegrasikan kritik internal melalui reformasi retorika dan penyesuaian kebijakan parsial tanpa mengorbankan fondasi strukturalnya.

³² Mohseni, *Guardian Politics In Iran: A Comparative Inquiry Into The Dynamics Of Regime Survival*.

Ketiga kerangka teoritis ini bekerja secara sinergis untuk memberikan pemahaman holistik tentang ketahanan sistem politik Iran. Teori post-Islamisme Bayat menjelaskan transformasi aspirasi masyarakat dan bentuk resistensi kreatif yang tidak sepenuhnya mengancam sistem; teori *religious secularity* Ghobadzadeh mengungkap mekanisme diskursif dan ideologis yang mempertahankan legitimasi ganda; sementara konsep ketahanan rezim Mohseni menyediakan analisis institusional tentang bagaimana struktur kekuasaan beradaptasi dan bertahan.

Pendekatan integratif ini memungkinkan penelitian untuk melampaui dikotomi sederhana antara "ketahanan" versus "keruntuhan" sistem, dan sebaliknya menganalisis sistem sebagai entitas dinamis yang mampu merespons tantangan melalui kombinasi strategis antara adaptasi ideologis, diferensiasi sosial, dan restrukturisasi institusional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi mekanisme ketahanan sistem, tetapi juga mengakui kompleksitas transformasi sosial yang sedang berlangsung di Iran dalam konteks modernitas global yang terus berubah.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian jenis kualitatif melalui studi pustaka (*library reasearch*) sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Fokus utama diarahkan pada analisis teks terhadap sumber-sumber primer seperti konstitusi Iran, doktrin *velāyat-e faqīh*, pemikiran tokoh atau ulama syiah, serta dokumen yang terkait dengan gerakan-gerakan protes, seperti "Woman, Life, Freedom". Selain itu, sumber-sumber sekunder seperti artikel ilmiah, buku, dan laporan media turut digunakan guna

memberikan konteks historis dan politik yang mendalam. Pemilihan sumber dilakukan secara cermat berdasarkan kredibilitas dan keterkaitannya dengan isu utama, yakni mekanisme ketahanan dan integrasi antara prinsip kedaulatan Tuhan dan dinamika partisipasi publik dalam struktur politik Iran.

Analisis wacana dimanfaatkan dalam penelitian ini untuk menelusuri bagaimana kekuasaan dikonstruksikan dan dilegitimasi dalam teks-teks resmi negara, serta bagaimana konstruksi tersebut beresonansi dengan wacana yang berkembang dalam gerakan sosial. Pendekatan ini memberi ruang bagi peneliti untuk mengidentifikasi koherensi dan artikulasi antara narasi dominan yang diproduksi oleh rezim dan narasi yang dibentuk oleh masyarakat dalam konteks aspirasi kolektif. Melalui perbandingan antara dokumen resmi dan materi dari gerakan sosial, penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana sistem politik Iran mempertahankan keseimbangan antara dasar legitimasi teokrasi dan dinamika responsivitas terhadap aspirasi demokratis masyarakat.

Interpretasi terhadap data dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis teks pada kerangka teoritis yang dikembangkan oleh Ghobadzadeh dan Bayat. Teks-teks keagamaan dan politik dianalisis kembali menggunakan perspektif religious secularity untuk mengeksplorasi mekanisme harmonisasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai partisipasi publik dalam sistem pemerintahan. Sementara itu, dinamika gerakan sosial dipahami melalui pendekatan post-Islamisme guna menangkap evolusi dan adaptasi strategi politik yang berkembang dari tingkat akar rumput. Selanjutnya, konsep

ketahanan institusional dan kekuatan regulatif yang dikembangkan oleh Mohseni digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami bagaimana sistem politik Iran mempertahankan stabilitas melalui mekanisme legitimasi dan pengelolaan dinamika sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis konfigurasi sistem yang ada, tetapi juga menerangkan sumber-sumber ketahanan struktural dan landasan teoritis yang mendukung persistensi sistem politik Iran.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan disusunnya sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar penelitian terarah dan sesuai dengan alur pembahasan yang diteliti, sehingga dapat mempresentasikan gambaran penelitian secara umum untuk dipahami. Penulis akan membagi sistematika pembahasan ini kedalam lima bab, yaitu:

Bab pertama akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teoretis, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis akan menguraikan genealogi konstitusi Iran hingga doktrin *velāyat-e faqīh* menjadi pondasi ideologis Republik Islam Iran yang dirumuskan oleh Khomeini serta perkembangan praktiknya pasca-Revolusi 1979 yang mengalami transformasi dari konsep teoritis menjadi sistem pemerintahan operasional dengan amandemen konstitusi 1989 yang memperluas wewenang *Rahbar*.. Selain itu, pada bab ini akan dibahas bagaimana Naser Ghobadzadeh memberikan kritik teologis terhadap

sistem politik Iran berdasarkan argumennya bahwa *velāyat-e faqīh* merupakan inovasi modern tanpa landasan kuat dalam tradisi Syiah klasik, dan menawarkan konsep *religious secularity* sebagai alternatif yang memisahkan otoritas keagamaan dari kekuasaan politik secara institusional sambil mempertahankan peran normatif agama dalam pembentukan kebijakan publik melalui partisipasi demokratis. Diakhir bab penulis memaparkan beberapa keterbatasan kritik Naser Ghobadzadeh.

Bab ketiga akan membahas kegagalan struktural sistem *velāyat-e faqīh* melalui perspektif post-Islamisme Asef Bayat yang menunjukkan bahwa upaya Islamisasi negara justru melahirkan birokratisasi agama yang kehilangan daya tarik di mata masyarakat, khususnya generasi muda. Penulis akan mengulas bagaimana gerakan-gerakan protes yang muncul dari bawah khususnya gerakan Woman, Life, Freedom yang digerakkan oleh wanita dan anak-anak muda bisa melemahkan legitimasi sistem politik di Iran.

Bab keempat, penulis akan membahas tantangan legitimasi multidimensi yang dihadapi sistem *velāyat-e faqīh*, meliputi dimensi teologis yang menunjukkan kesenjangan antara klaim representasi ilahi dengan realitas praktik kekuasaan yang tidak mencerminkan idealisme spiritual. Pembahasan skenario reformasi mengeksplorasi dua jalur potensial: jalan teologis melalui reinterpretasi doktrin yang membuka ruang bagi eksperimentasi politik lebih demokratis dan jalan sosiologis melalui tekanan gerakan sosial yang terdesentralisasi dan berbasis akar rumput di mana perubahan terjadi dari bawah tanpa mengandalkan struktur kepemimpinan hierarkis.

Bab terakhir yaitu bab kelima penulis menyajikan Bab ini menyajikan kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian mengenai penguatan fundamental dalam sistem teodemokrasi Iran antara kedaulatan ilahi dan kedaulatan rakyat, tantangan struktural doktrin *velāyat-e faqīh* baik dari perspektif teologis maupun sosiologis.



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan fokus permasalahan yang termuat dalam rumusan penelitian, serangkaian kesimpulan konstruktif dapat ditarik setelah dilakukan analisis mendalam, yang secara tegas menegaskan daya tahan dan keunikan sistem politik Iran. *Pertama*, analisis kritis terhadap Konstitusi Republik Islam Iran mengungkapkan bahwa dokumen tersebut merupakan suatu capaian politik yang brilian dan realistis. Konstitusi ini berhasil membangun fondasi yang kokoh bagi sebuah sistem "teodemokrasi" yang seimbang, dengan tidak menginstitusionalisasikan pertentangan, melainkan simbiosis mutualistik antara kedaulatan ilahi—yang menjamin kemaslahatan tertinggi dan kesinambungan nilai-nilai revolusi—dan partisipasi politik rakyat. Mekanisme demokratis, seperti pemilihan presiden dan anggota parlemen, berfungsi sebagai saluran legitimasi serta penggerak dinamika sosial-politik. Sementara itu, doktrin velāyat-e faqīh dan otoritas Pemimpin Tertinggi (Rahbar), didukung oleh lembaga-lembaga non-elektoral seperti Dewan Penjaga dan Korps Pengawal Revolusi Islam (Sepāh), berperan sebagai penjaga konstitusional dan penjamin stabilitas jangka panjang. Konfigurasi ini memastikan bahwa seluruh kebijakan publik tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam dan kepentingan nasional. Konstruksi demikian justru menghindarkan Iran dari potensi kediktatoran mayoritas atau politik yang semata-mata pragmatis. Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat dikategorikan sebagai

"teokrasi elektoral" yang problematis, melainkan lebih tepat disebut sebagai "demokrasi berbingkai nilai" (value-framed democracy), yang dilengkapi dengan mekanisme koreksi internal dan visi yang bersifat transendental.

Kedua, fenomena gerakan protes di Iran, termasuk gelombang "Woman, Life, Freedom" (2022-2023), apabila dikaji secara objektif, justru dapat dipandang sebagai ujian dinamik dan masukan kritis yang memperkuat serta menyempurnakan sistem teodemokrasi tersebut. Kemunculan gerakan-gerakan ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi dan kesadaran politik masyarakat, yang pada dasarnya merupakan produk dari ruang politik yang tersedia di dalam sistem. Sistem politik Iran memiliki kapasitas untuk menyerap, mendengarkan, dan merespons aspirasi yang muncul, khususnya dari generasi muda, melalui berbagai mekanisme musyawarah yang telah terlembagakan. Perspektif post-Islamisme justru mengonfirmasi bahwa masyarakat Iran adalah entitas yang hidup dan berkembang, dan sistem yang ada dirancang untuk mengakomodasi perkembangan tersebut dalam koridor prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian, gelombang protes bukanlah indikator kegagalan ideologis, melainkan bagian dari dialektika sosial dalam sebuah sistem yang kompleks. Proses ini mendorong negara untuk secara terus-menerus melakukan rekayasa sosial yang adaptif tanpa kehilangan identitas fundamentalnya. Setiap gejolak pada akhirnya berfungsi sebagai bahan koreksi konstruktif bagi elit politik dan keagamaan untuk menyelaraskan kebijakan dengan realitas sosial yang senantiasa berubah.

Ketiga, berdasarkan refleksi atas dinamika internal dan daya tahannya, sistem politik Iran telah membuktikan diri sebagai suatu sistem yang eksis, legitimate, dan merupakan alternatif yang viable untuk masa depan. Dalam konteks tatanan global yang didominasi oleh model demokrasi liberal-sekuler, Iran menawarkan sebuah paradigma alternatif: suatu sistem yang berani mengintegrasikan spiritualitas, etika agama, dan kedaulatan rakyat dalam satu kerangka politik yang koheren. Masa depan hubungan antara Islam dan demokrasi, menurut model Iran, tidak terletak pada pemisahan institusional yang kaku, melainkan pada harmonisasi fungsional di mana agama memberikan bingkai etika dan visi jangka panjang, sedangkan mekanisme demokrasi menyediakan instrumen untuk akuntabilitas dan partisipasi. Sistem politik Iran juga merupakan jawaban inklusif atas pluralitas internalnya, dengan seperangkat mekanisme yang menjamin keterwakilan berbagai mazhab dan kelompok etnis. Dengan terus-menerus menyempurnakan diri melalui dialog internal dan mempertahankan ketahanan terhadap tekanan eksternal, sistem Iran tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga menawarkan alternatif yang relevan bagi bangsa-bangsa yang mencari model pemerintahan yang tidak sepenuhnya sekuler maupun teokratis murni. Ia menawarkan sebuah sintesis yang unik dan kontekstual, sesuai dengan latar historis dan kulturalnya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang dihasilkan, penelitian ini merekomendasikan suatu agenda riset prospektif. Untuk memperkaya wacana dalam studi politik Timur Tengah

dan memahami kompleksitas model Iran secara lebih utuh, kajian mendatang sangat dianjurkan untuk terus mengeksplorasi dialektika dan daya adaptasi dalam sistem "teodemokrasi" tersebut. Pendekatan ini dapat dielaborasi lebih lanjut dengan menerapkan kerangka teori rezim hibrida (hybrid regimes) untuk menganalisis interaksi unik antara mekanisme elektoral dan lembaga penjaga non-elektoral, atau melalui analisis kritis ekonomi politik Iran guna menguji korelasi antara stabilitas sistem, kebijakan ekonomi, dan dinamika legitimasi.

Dengan demikian, penelitian ini bukanlah sebuah kesimpulan final, melainkan sebuah titik tolak untuk penyelidikan yang lebih mendalam. Kelanjutannya diharapkan dapat menyertakan data empiris yang lebih kuat dan referensi yang lebih beragam, khususnya dalam menganalisis peran strategis aktor-aktor non-negara seperti Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai penjaga sekaligus pemain dalam dinamika internal sistem. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi lebih jauh agensi politik dari generasi milenial dan Generasi Z, yang dalam simpulan dipandang sebagai sumber masukan kritis dan katalis potensial bagi rekayasa sosial adaptif di Iran, tanpa mengabaikan kerangka nilai yang ada. Pemenuhan ekspektasi riset ini akan menjadi penyempurna yang signifikan bagi temuan awal, sehingga melahirkan penelitian-penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan substantif mengenai daya tahan serta evolusi sistem politik Iran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdo, Geneive. "Re-Thinking the Islamic Republic: A 'Conversation' with Ayatollah Hossein 'Ali Montazeri." *Middle East Institute* 55, no. 1 (2001): 9–24. <http://www.jstor.com/stable/4329579>.
- Abrahamian, Ervand. *A History of Modern Iran*. 3 ed. Cambridge University Press, 2023.
- Abrahamian, Ervand. *Khomeinism: Essays on the Islamic Republic*. University Of California Press, 1993.
- Abrahamian, Ervand. "The Crowd in The Persian Revolution." *Iranian Studies* 2, no. 4 (1969): 128–50. <https://doi.org/10.1080/00210866908701385>.
- Adib, Muhammad, dan Nur Qomari. "Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, dan Demokratisasi." *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 18–33. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v1i2.129>.
- Afary, Janet. "The Human Rights of Middle Eastern & Muslim Women: A Project for the 21st Century." *Human Rights Quarterly* 26, no. 1 (2004): 106–25. <https://doi.org/10.1353/hrq.2004.0002>.
- Afoneh, Ali. *The Revolutionary Guards' Role in Iranian Politics - Middle East Forum*. 15, no. 4 (2008): 1–21. <https://www.meforum.org/middle-east-quarterly/the-revolutionary-guards-role-in-iranian-politics>.
- Al Talei, Rafiah, Sara Bazoobandi, dan Nima Khorrami. "Hijab in Iran: From Religious to Political Symbol." *Carnegie Endowment For International Peace*, 13 Oktober 2022. <https://carnegieendowment.org/sada/2022/10/hijab-in-iran-from-religious-to-political-symbol?lang=en>.
- Altman, Melissa. "Tufekci, Z.: Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest." *VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations* 29, no. 4 (2018): 884–85. <https://doi.org/10.1007/s11266-017-9927-0>.

- Anam, Moh Choirul, Fawaizul Umam, dan . Aminullah. “PERAN PEREMPUAN DI IRAN PASCA REVOLUSI 1979 DALAM PERSPEKTIF SHIRIN EBADI.” *Mozaic: Islamic Studies Journal* 1, no. 02 (2022): 35–48. <https://doi.org/10.35719/mozaic.v1i02.1719>.
- Ansari, Ali M. *Modern Iran: The Pahlavis and After*. Longman, 2007.
- Arjomand, Said Amir. *After Khomeini: Iran Under His Successors*. Oxford University Press, 2009.
- Arjomand, Said Amir. “The Crisis of the Imamate and the Institution of Occultation in Twelver Shiism: A Sociohistorical Perspective.” *Cambridge University Press* 28, no. 4 (1996): 491–515. <https://www.jstor.org/stable/176150>.
- Asad, Talal. *Genealogies of Religion*. Johns Hopkins University Press, 1993.
- Bayat, Asef. “From ‘Dangerous Classes’ to ‘Quiet Rebels’: Politics of the Urban Subaltern in the Global South.” *International Sociology* 15, no. 3 (2000): 533–57. <https://doi.org/10.1177/026858000015003005>.
- Bayat, Asef. *Islam and Democracy: What is the Real Question?* ISIM papers. Amsterdam University Press, 2007.
- Bayat, Asef. “Islamism and Social Movement Theory.” *Third World Quarterly* 26, no. 6 (2005): 891–908. <https://doi.org/10.1080/01436590500089240>.
- Bayat, Asef. *Life as Politics: How Ordinary People Change the Middle East*. Stanford University Press, 2010.
- Bayat, Asef. *Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford University Press, 2007. <https://doi.org/doi:10.1515/9781503626485>.
- Bayat, Asef. *Post-Islamism: The Changing Faces Of Political Islam*. 1 ed. Oxford University Press, 2013.
- Bayat, Asef. *Revolution without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring*. Stanford Studies in Middle Eastern and Islamic Societies and Cultures. Stanford University Press, 2023.
- Bayat, Asef. *Social Movements and the Post-Islamist Turn*. Stanford University Press, 2007. <https://doi.org/doi:10.1515/9781503626485>.

- Bayat, Asef. "The coming of a post-Islamist Society." *Critique: Critical Middle Eastern Studies* 5, no. 9 (1996): 43–52. <https://doi.org/10.1080/10669929608720091>.
- Bayat, Asef. "The Post-Islamist Revolutions." *Foreign Affairs*, 26 April 2011.
- Bayat, Asef. "What Is Post-Islamism?" *ISIM Review* 16, 2005, 5–6.
- Belhaj, Abdessamad. "From Divine to Popular Sovereignty: The Civil Shift in Contemporary Islamic Political Thought." *Religions* 16, no. 5 (2025): 622. <https://doi.org/10.3390/rel16050622>.
- Belhaj, Abdessamad. "Loyalitas Politik dalam Etika Islam Kontemporer: Perspektif Sunni dan Syiah." *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2024): 52–72.
- Bizaer, Maysam. "Iran's rising Generation Z at the forefront of protests." *Middle East Institute*, 5 Oktober 2022.
- Boroumand, Ladan. "Iranians Turn Away from the Islamic Republic." *Journal of Democracy* 31, no. 1 (2020): 169–81. <https://dx.doi.org/10.1353/jod.2020.0014>.
- Bozorgmehr, Najmeh. "The revolutionary ambitions of Iran's Generation Z." *Euro News* (Tehran), 16 Oktober 2022.
- Brumberg, Daniel, Farideh Farhi, dan Editors. *Power and Change in Iran: Politics of Contention and Conciliation*. Indiana University Press, 2016. <https://doi.org/10.2307/j.ctt1bmzp38>.
- C. Scott, James. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. Yale University Press, 1990. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1np6zz>.
- Chehabi, H. E. "The Political Regime of the Islamic Republic of Iran in Comparative Perspective." *Government and Opposition* 36, no. 1 (2001): 48–70. <https://doi.org/10.1111/1477-7053.00053>.
- Chehabi, H.E. *Iranian Politics and Religious Modernism: The Liberation Movement of Iran Under the Shah and Khomeini*. Cornell University Press, 1990.

- Chehabi, H.E., dan V. Martin. *Iran's Constitutional Revolution: Popular Politics, Cultural Transformations and Transnational Connections*. International library of Iranian studies. I.B. Tauris, 2010.
- Cole, Juan. "Parsa Misagh, Social Origins of the Iranian Revolution (New Brunswick: Rutgers University Press, 1989)." *Comparative Studies in Society and History* 34, no. 1 (1992): 192–93. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/S0010417500017552>.
- Collins, Josua Satria. "PERS SEBAGAI PILAR DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (PRESS AS A PILLAR OF DEMOCRACY IN ISLAMIC PERSPECTIVE)." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 2 (2021): 142–73. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i2.25>.
- Dana El Kurd. "Religiosity and Its Political Effects." *AlMuntaqa* 1, no. 2 (2018): 81. <https://doi.org/10.31430/almuntaqa.1.2.0081>.
- Diamond, Larry Jay. "Thinking About Hybrid Regimes." *Journal of Democracy* 13, no. 2 (2002): 21–35. <https://doi.org/10.1353/jod.2002.0025>.
- Diana, Rashda, Abdul Rohman, dan Harisman H. "Konsep Kepemimpinan Islam: Telaah Pemikiran Politik Islam al-Mawardi." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.6490>.
- Dirik, Dilar. *The Kurdish Women's Movement: History, Theory, Practice*. Pluto Press, 2021. <https://doi.org/10.2307/j.ctv2rr3gpt>.
- Eley, Geoff. "Habermas Jürgen, The Structural Transformation of the Public Sphere. An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1989)." *Comparative Studies in Society and History* 34, no. 1 (1992): 189–90. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/S0010417500017527>.
- Elmore, Naela. "Solidarity across borders: transnational implications from the Mahsa Amini movement." *Social Movement Studies*, Routledge, 24 September 2024, 1–7. <https://doi.org/10.1080/14742837.2024.2407301>.

- Falamsyah, Sony. "Pemikiran Politik Mohammad Natsir Tentang Pemerintahan Islam." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 6, no. 1 (2022): 115. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.1533>.
- Fassihi, Farnaz. "In Iran, Woman's Death After Arrest by the Morality Police Triggers Outrage." *New York Times*, 16 September 2022.
- Febriansyah Ramadhan, Deny Noer Wahid, dan Nabil Nizam. "Hubungan Negara Dan Agama: Telaah Hukum Dan Putusan Pengadilan." *JAPHTN-HAN* 2, no. 1 (2023): 1–36. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.58>.
- Gamaan. *Iranians' Attitudes Toward Religion: A 2020 Survey Report*. GAMAAN, 2020. <https://gamaan.org/2020/08/25/iranians-attitudes-toward-religion-a-2020-survey-report/>.
- Ghobadzadeh, Naser. *Religious Secularity: A Theological Challenge to the Islamic State*. Oxford University Press, 2015.
- Ghobadzadeh, Naser. "Theological Critique of Velayat-e Faqih." *Democratization* 24, no. 3 (2022): 678–95. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1994548>.
- Ghobadzadeh, Naser, dan Lily Zubaidah Rahim. "Electoral theocracy and hybrid sovereignty in Iran." *Contemporary Politics* 22, no. 4 (2016): 450–68. <https://doi.org/10.1080/13569775.2016.1175097>.
- Golkar, Saeid. *Captive Society: The Basij Militia and Social Control in Iran*. Woodrow Wilson Center Series. Columbia University Press, 2015.
- Gould, Rebecca Ruth. "Iran: Creativity in the Aftermath of Uprising." *JSTOR Daily*, 9 April 2025. <https://daily.jstor.org/iran-creativity-in-the-aftermath-of-uprising/>.
- Group, World Bank. *Gini Index - Iran, Islamic Rep*. World Bank Group, 2024.
- HRANA. *Iran Protests 2022 -Detailed Report of 82 Days of Nationwide Protests in Iran*. Human Rights Activists, 2022.
- (HRANA), Human Rights Activists News Agency. *Demographic Analysis of Iran's 2022–2023 Protest Movement*. HRANA, 2023.

- International, Amnesty. "Iran: Death in Custody of Mahsa Amini Must Be Criminally Investigated." *Amnesty International* (London), 2022. <https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/5034/2022/en/>.
- International, Amnesty. "Iran: Two years after 'Woman Life Freedom' uprising, impunity for crimes reigns supreme." *Amnesty International*, 11 September 2024. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/09/iran-two-years-after-woman-life-freedom-uprising-impunity-for-crimes-reigns-supreme/>.
- International, Amnesty. "Iran: Year of 'unspeakable Cruelty' from Authorities after Mahsa Amini's Death." *Amnesty International*, 13 September 2023. <https://www.amnesty.org.uk/press-releases/iran-year-unspeakable-cruelty-authorities-after-mahsa-aminis-death>.
- Iranwire. "'Bi-Sharaf!': A Guide to the Slogans Heard at Protests in Iran." *IRANWIRE*, 22 September 2022. <https://iranwire.com/en/society/107735-guide-to-the-slogans-heard-at-protests-in-iran/>.
- Izadi, Dariush, dan Stephanie Dryden. "Woman/Life/Freedom: The Social Semiotics behind the 2022 Iranian Protest Movement." *Discourse, Context & Media* 60 (Agustus 2024): 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2024.100803>.
- Izadi, Dariush, dan Stephanie Dryden. "Woman/Life/Freedom: The Social Semiotics behind the 2022 Iranian Protest Movement." *Discourse, Context & Media* 60 (Agustus 2024): 100803. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2024.100803>.
- Kadivar, Mohsen. "Democracy and ethical values from Islamic perspective." *Philosophy & Social Criticism* 46, no. 5 (2020): 563–75. <https://doi.org/10.1177/0191453720909583>.
- Kadivar, Mohsen. "Nazariyeha-ye dowlath dar feqh-e shieh." *Tehran: Nashr-e Ney*, 1999.
- Kadivar, Mohsen. "Revisiting Women's Rights in Islam: 'Egalitarian Justice' in lieu of 'Deserts-based Justice.'" Dalam *Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition*, Ziba Mir-Hosseini, Lena Larsen, Christian Moe, and Kari Vogt. IB TAURIS, 2013.

- Kamrava, Mehran, ed. *Iran's Intellectual Revolution*. Cambridge Middle East Studies. Cambridge University Press, 2008. Cambridge Core.
- Kamrava, Mehran. *The Political History of Modern Iran: From Tribalism to Theocracy*. Praeger Publishers Inc, 1992.
- Khadem, Nassim. "Two years after the death in custody of Mahsa Amini, Iranians engage in a 'quiet revolution.'" *ABC News*, 16 September 2024. <https://www.abc.net.au/news/2024-09-16/iran-mahsa-amini-women-human-rights-protests-uprising-hijab-laws/104343436>.
- Khalaji, Mehdi. "The Iranian Clergy's Silence." *Current Trends in Islamist Ideology* 10 (Januari 2010): 42. Gale Academic OneFile.
- Khomeini, Ruhollah. *Islamic Government: Governance of the Jurist*. Manor Books, 1979.
- Khosrokhavar, Farhad. *The New Arab Revolutions That Shook the World*. 1 ed. Routledge, 2012.
- Khosrokhavar, Farhad. "The New Conservatives Take a Turn." *Middle East Report*, no. 233 (2004): 24–27. <https://doi.org/10.2307/1559447>.
- Knaus, Isabella. "'Woman, Life, Freedom': Collective Female Resistance in Iran." *Colorado State University*, 13 Desember 2024.
- Kurzman, Charles. *Liberal Islam: A Source Book*. Oxford University Press, 1998.
- Lingga, Musdiansyah. "Kasus Jilbab Masya Amini : Dinamika Gerakan Feminisme di Negara Islam." *Saree: Research in Gender Studies* 6, no. 1 (2024): 1–14. <https://doi.org/10.47766/saree.v6i1.2386>.
- Macgillivray, Iain. "The Resilience of Authoritarianism in Iran After the 2009 Election." *International Relations*, 2016. <https://www.e-ir.info/2016/05/04/the-resilience-of-authoritarianism-in-iran-after-the-2009-election/>.
- Mahdavi, Mojtaba. "The Velayat-e Faqih: Basis, Power, and Longevity." Dalam *The Sacred Republic*, 1 ed., disunting oleh Mehran Kamrava. Oxford University Press, 2023. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197747711.003.0005>.

- Mahmood, Saba. *Politics of Piety: The Islamic Revival and the Feminist Subject*. Princeton University Press, 2005.
- Mavani, Hamid. "Khomeini's Concept of Governance of the Jurisconsult '(Wilayat al-Faqih)' Revisited: The Aftermath of Iran's 2009 Presidential Election." *The Middle East Journal* 67, no. 2 (2013): 207–28. <https://doi.org/10.3751/67.2.13>.
- Mehran, Golnar. "Socialization of Schoolchildren in the Islamic Republic of Iran." *Iranian Studies* 22, no. 1 (1989): 35–50. <https://doi.org/10.1080/00210868908701724>.
- Michaelsen, Marcus. "Exit and Voice in a Digital Age: Iran's Exiled Activists and the Authoritarian State." *Globalizations* 15, no. 2 (2018): 248–64. <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1263078>.
- Mirsepasi, Ali. *Democracy in Modern Iran: Islam, Culture, and Political Change*. NYU Press, 2010. n.
- Mirsepasi, Ali. *Political Islam, Iran, and the Enlightenment: Philosophies of Hope and Despair*. Cambridge University Press, 2010.
- Misbah, Muhammad. "Journeys Toward Gender Equality In Islam." *Religion* 55, no. 1 (2025): 430–32. <https://doi.org/10.1080/0048721X.2025.2424119>.
- Mohseni, Payam. *Guardian Politics In Iran: A Comparative Inquiry Into The Dynamics Of Regime Survival*. Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown, 2012.
- Molana, Hanieh, A. Marie Ranjbar, dan Sahar Razavi. "Woman, Life, Freedom: Decoding the Feminist Uprising in Iran." *Political Geography* 103 (Mei 2023): 1–3. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102834>.
- Monshipouri, Mahmood, dan Ramtin Zamiri. "Woman, Life, Freedom, One Year Later: Will the Iran Protests Succeed?" *Middle East Policy* 30, no. 4 (2023): 10–25. <https://doi.org/10.1111/mepo.12722>.
- Moslem, Mehdi. *Factional Politics in Post-Khomeini Iran*. Modern Intellectual and Political History of the Middle East. Syracuse University Press, 2002.

- Muhammad, Kaharuddin, Sunny Ummul Firdaus, dan Muhammad Hasrul La Aci. “Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat.” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 4 (2023): 354–68.
- Nazloo, Amir Mohammad Khorshidi, dan Seyed Amir Niakooee. “Trajectory of Democracy in Iran from 2009 to 2022: An Analysis Based on Charles Tilly’s Framework of Democratization and De-Democratization.” *Democracy and Security*, Routledge, 2025, 1–40. <https://doi.org/10.1080/17419166.2025.2449654>.
- Ni’am, Syamsun. “Dari Monarki Menuju Republik Islam: Menengok Iran Masa Lalu dan Masa Modern.” *Al-’Adalah* 16, no. 1 (2022): 139–50.
- Nilhakim, Nilhakim. “Islam, Demokrasi Liberal Dan Sekularisme Oleh Nader Hashemi Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer.” *AL-SULTHANIYAH* 10, no. 1 (2021): 13–27. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v10i1.379>.
- Nourai, Fereshte M. “The Constitutional Ideas of a Shi’ite Mujtahid: Muhammad Husayn Na’ini.” *Iranian Studies* 8, no. 4 (1975): 234–47. <https://doi.org/10.1080/00210867508701501>.
- Ondey, Eka Ifaynita, Christian De Fretes, dan Indra Wisnu Wibisono. “Feminism Movement as a Catalyst for Democratization in Iran 2022-2024.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 12, no. 6 (2025): 363–75. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v12i6.6854>.
- Owen, David. *Political concepts*. Manchester University Press, t.t. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt155jbcx.13>.
- Parsa, Misagh. *Democracy in Iran: Why It Failed and How It Might Succeed*. Harvard University Press, 2016.
- Purnama, Fahmy Farid. “LIBERASI TEOLOGI DI IRAN PASCA-REVOLUSI: Telisik Pemikiran Abdul Karim Soroush.” *Jurnal Theologia* 27, no. 1 (2016): 25–50. <https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.1.923>.

- Radeck, Mats, dan Avin Khodakarim. "Iran: The Beginning of a Feminist Revolution." *Horizon Insights* 5, no. 4 (2022): 1–23. <https://doi.org/10.31175/hi.2022.04>.
- Rahimi, Babak. "Cyberdissent: The Internet In Revolutionary Iran." *MERIA* 7, no. 3 (2003): 101–15.
- Rahimi, Babak. *The Politics of the Internet in Iran*. Mehdi Semati. Routledge, 2008.
- Rahman, Fatima Z. "Determinants of Democracy in the Muslim World." *Polity* 45, no. 4 (2013): 554–79. <https://doi.org/10.1057/pol.2013.18>.
- "Reigniting the Flame of Change: The Resurgence of Iran's Radical Feminist Movement in the Aftermath of Mahsa Ahmini's Death." *Jurnal of Middle East and Islamic Studies* 10, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.7454/meis.v10i2.168>.
- Reisinezhad, Arash. "The Iranian Green Movement: Fragmented Collective Action and Fragile Collective Identity." *Iranian Studies* 48, no. 2 (2015): 193–222. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1080/00210862.2013.859885>.
- Reuters. "Son of Iranian Leader Khamenei Is Hardliner with Backroom Influence." *Reuters*, 23 Juni 2025.
- Ridgeon, Lloyd. "Ahmad Qābel, Sekularitas Keagamaan dan Velāyat-e Faqih di Iran." *Religions* 13, no. 5 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.3390/rel13050422>.
- Rojhelati, Ziryan. "Zhina's Protests in Iran." *Rudaw Research Center*, 2022.
- Saatchi, Elaheh. *New Leaderless Social Movements: From the Unified Mass to the Uneven Multitude A Case Study of the Changing Pattern of Social Movements in PostRevolutionary Iran*. Ghent University, 2024.
- Sadeghi, Fatemeh, dan Setareh Shohadaei. "From Women's Revolution to Jiyani Democracy." *Journal of Middle East Women's Studies* 19, no. 3 (2023): 458–68. <https://doi.org/10.1215/15525864-10815679>.
- Sadeghi-Boroujerdi, Eskandar. "Iran's Uprisings for 'Women, Life, Freedom': Over-Determination, Crisis, and the Lineages of Revolt." *Politics* 43, no. 3 (2023): 404–38. <https://doi.org/10.1177/02633957231159351>.
- Saepudin, Syifa Aulia Al Mustofa, dan Fadhillah Kashmir. "Dinamika Gerakan Sosial Wanita Iran Pasca Kematian Mahsa Amini." *Articles. Jurnal Ilmu Hubungan*

- Internasional LINO* 4, no. 1 (2024): 1–12.
<https://doi.org/10.31605/lino.v4i1.3462>.
- Salehi-Isfahani, Djavad. *Iran's Generation Z and the Crisis of Legitimacy*. 305. Middle East Report, 2023.
- Sarihan, Ali. “The Ascendancy of Secular Trends in Iran.” *Religions* 16, no. 5 (2025): 592. <https://doi.org/10.3390/rel16050592>.
- Scott, James C. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press, 1985.
- Service, BBC Persian. “Chanting ‘Death to the Dictator’: Iran’s Protest Slogans Decoded.” *BBC News*, 5 Oktober 2022. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63156324>.
- Shahi, Afshin, dan Alam Saleh. “Andalusiasation: Is Iran on the Trajectory of De-Islamisation?” *British Journal of Middle Eastern Studies* 42, no. 4 (2015): 500–519. <https://doi.org/10.1080/13530194.2015.1020534>.
- Shariati, Ali. *On the Sociology of Islam*. Mizan Press, 1979.
- Shariati, Ali. *Red Shi'ism vs. Black Shi'ism*. Shariati Foundation, 1980.
- Shevlin, Neil. “Velayat-E Faqih In The Constitution Of Iran: The Implementation Of Theocracy.” *Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (1998): 358–85.
- Siavoshi, Sussan. “Cultural Policies and the Islamic Republic: Cinema and Book Publication.” *International Journal of Middle East Studies* 29, no. 4 (1997): 509–30. <https://doi.org/10.1017/S0020743800065181>.
- Sinaiee, Maryam. “Inside Qom Seminary, Iran’s Political and Spiritual Powerhouse.” *Iran International*, 7 Mei 2025.
- Soroush, Abdolkarim. *Reason, Freedom, and Democracy in Islam: Essential Writings of Abdolkarim Soroush*. Oxford University Press, 2000.
- Sreberny, Annabelle, dan Gholam Khiabany. *Blogistan: The Internet and Politics in Iran*. Blogistan: The Internet and Politics in Iran. Bloomsbury Academic, 2010..
- Sterkens, Carl. “RELIGION AS A SOCIALLY CONSTRUCTED COGNITIVE BODY OF KNOWLEDGE An Attempt to Define Religion within the Modern

- Context from a Social Scientific Perspective.” *Studia Philosophica et Theologica* 7, no. 2 (2007): 109–37.
- Sumarno, Wisnu Fachrudin. “Sejarah Politik Republik Islam Iran Tahun 1905-1979.” *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 3, no. 2 (2020): 145–58. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v3i2.1931>.
- Syakharani, Abdul Wahab, Ahmad Rafi’i, dan Anif Ramadhani. “Sistem Pendidikan di Negara Iran.” *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION* 2, no. 3 (2022): 329–38.
- Tahmasebi-Birgani, Victoria. “Social Media as a Site of Transformative Politics: Iranian Women’s Online Contestations.” Dalam *Iran’s Struggles for Social Justice: Economics, Agency, Justice, Activism*, disunting oleh Peyman Vahabzadeh. Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-44227-3_11.
- Tohidi, Nayereh. “Iran in a Transformative Process by Woman, Life, Freedom.” *Freedom of Thought Journal*, no. 13 (Juni 2023): 29–57.
- Tohidi, Nayereh. “Women’s Rights and Feminist Movements In Iran.” *International Journal on Human Rights* 13, no. 24 (2016): 75–89.
- Waligorski, Conrad P. *The Political Theory of Conservative Economists*. Pers Universitas Kansas, 1990..
- Wantika, Ayu, dan Fitriani Fitriani. “Sekularisme di Barat.” *Diterbitkan Oleh Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* 23, no. 1 (2024): 25.
- Yasmine, Shafira Elnanda. “Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah.” *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* 28, no. 2 (2015): 106–13.
- Zulkarnen, Zulkarnen. “Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran.” *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 3, no. 1 (2017): 1. <https://doi.org/10.36722/sh.v3i1.194>.